



Tarif Integrasi Transportasi DKI Dinilai Mahal

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Rekomendasi besaran tarif integrasi antarmoda transportasi umum DKI Jakarta untuk MRT, LRT, dan Transjakarta sebesar Rp 10 ribu dinilai masih tergolong mahal. Tarif itu dinilai mahal jika merujuk pada data Bank Dunia yang mengungkap masyarakat mengalokasikan belanja biaya transportasi setiap bulannya senilai 10 persen dari total pendapatan.

"Kalau kita pakai UMP (upah minimum provinsi) DKI Jakarta yang masih di bawah Rp 5 juta per bulan, tentunya tarif integrasi Rp 10 ribu masih agak berat," kata Direktur Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang kepada *Republika*, Rabu (8/6).

Dia memerinci, jika hitungan Rp 10 ribu sekali jalan dikali dua perjalanan setiap hari dan 26 hari kerja, totalnya Rp 520 ribu. Jumlah itu, kata dia, masih lebih dari 10 persen UMP DKI yang kini sebesar Rp 4,6 juta.

"Apalagi bagi mereka yang (ditambah) gunakan KRL, pastinya akan mahal lagi biaya transportasinya setiap bulan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan tarif integrasi antarmoda transportasi umum LRT, MRT, dan Transjakarta dengan nominal sebesar Rp 10 juta. Komisi B menyakini tarif integrasi tiga moda transportasi umum tersebut bakal menggeser pola masyarakat menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Namun, Komisi B menyertakan rekomendasi integrasi tarif, yaitu ada evaluasi setiap tiga bulan selama satu tahun. Tujuannya untuk mengetahui dampak implementasi tarif integrasi terhadap minat masyarakat menggunakan moda transportasi massal.

Komisi B DPRD DKI juga merekomendasikan Pemprov DKI dan BUMD bidang jasa transportasi massal untuk mencatat jumlah peng-

guna integrasi tarif itu yang juga setiap tiga bulan dalam satu tahun dengan pemisahan warga KTP DKI dan non-KTP DKI Jakarta. Terakhir, ada fasilitas gratis tiket integrasi terhadap 16 kelompok masyarakat di DKI.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengharapkan, dengan adanya persetujuan tarif integrasi akan semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

"Karena transportasinya juga sudah semakin nyaman dan tarifnya pun terjangkau," ujarnya.

Meski demikian, dia mengaku perlu waktu lebih banyak dalam mengimplementasikan tarif integrasi. Pasalnya, ketentuan tarif itu akan disahkan terlebih dahulu melalui Sidang Paripurna DPRD dan dituangkan ke dalam keputusan gubernur.

"Nantinya juga akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dalam penerapan tarif integrasi transportasi ini. Kami berharap semua dapat berjalan lancar dan semakin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum," katanya.

Dia mengaku DKI akan terus berkomitmen menghadirkan transportasi demi memudahkan mobilitas warga. Pemprov DKI juga akan terus mendorong transportasi berkelanjutan.

■ [edupurkini](#)



Ada fasilitas gratis tiket integrasi terhadap 16 kelompok masyarakat di DKI.